EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

Potensi Ekonomi Sumber Daya Kelautan Wilayah Pesisir Kabupaten Langkat Dalam Mencapai *Blue Economy*

Sri Endang Rahayu[1*], Prawidya Hariani RS[2], Elizar Sinambela[3]
[1,2,3*]Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, Indonesia
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20221
*e-mail : sriendang@umsu.ac.id

Artikel Info

Received :
18 june 2022
Revised :
19 July 2022
Accepted :
22 July 2022

Kata Kunci :
Blue Economy, Sektor Maritim, Pertumbuhan Ekonomi

Keywords:
Blue Economy, Maritime Sector , Economic growth

ABSTRAK

Blue Economy merupakan sebuah kegiatan model ekonomi masa depan yang mempertimbangkan keunggulan dan strategi inovasi dengan mengikuti kondisi alam pesisir pantai. *Blue Economy* juga merupakan alat yang dapat digunakan untuk memperbaiki kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan dan menciptakan lebih banyak aktivitas dengan model aktivitas yang harus berkelanjutan. Konsep pembangunan berkelanjutan menjadi salah satu upaya untuk menjaga kelestarian lingkungan. Indonesia sangat mendukung implementasi konsep pembangunan berkelanjutan yang salah satu bentuk langkahnya adalah konsep *Blue Economy*. Sebagai negara maritim (*blue economy*), maka keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia menjadi sangat besar dan harus dikelola lebih efisien dan efektif, agar ekonomi masyarakat pesisir dimasa depan menjadi lebih baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis potensi ekonomi sumberdaya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep *Blue Economy* di Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Kontribusi sektor perikanan dan kelautan mengalami peningkatan yang diikuti dengan perkembangan wisata desa berbasis hutan mangrove. Tetapi potensi di kawasan mangrove belum tercapai secara optimal karena pemanfaatan ekonomi hasil dari ekosistem kawasan mangrove belum diusahakan secara ekonomis. Jadi tingkat ekonomi masyarakat di wilayah pesisir Kabupaten Langkat masih relatif rendah dan belum dapat mengembangkan sektor lain yang berbasis ekosistem pesisir. Perkembangan teknologi dan industrialisasi dibidang ekonomi saat ini menjadi dua hal yang kontradiksi terhadap kelestarian lingkungan alam di seluruh dunia, karena dorongan meningkatkan ekonomi menghasilkan banyak kerusakan alam yang berkaitan dengan pembangunan yang tidak berkelanjutan. Jadi pengembangan sektor ekonomi menjadi tantangan kuat bagi ekonomi dunia dengan penggunaan sistem yang cenderung eksploitatif. Pola perencanaan dan manajemen sektor kelautan serta perikanan harus tercermin dari RPJMD dan Rencana strategis bagi Kabupaten Langkat.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

Economic Potential of Coastal Marine Resources for Coastal Areas of Langkat Regency in Achieving Blue Economy

ABSTRACT

Blue Economy is a future economic model activity that considers advantages and innovation strategies by following the natural conditions of the coast. Blue Economy is also a tool that can be used to improve unfavorable economic conditions and create more activities with an activity model that must be sustainable. The concept of sustainable development is one of the efforts to preserve the environment. Indonesia strongly supports the implementation of the concept of sustainable development, one of which is the Blue Economy concept. As a maritime country (blue economy), Indonesia's biodiversity is very large and must be managed more efficiently and effectively, so that the economy of coastal communities in the future will be better.This study aims to analyze the economic potential of coastal marine resources in achieving the Blue Economy concept in Langkat Regency, Sumatra Utara *province. The contribution of the fisheries and marine sectors has increased, followed by the development of mangrove forest-based village tourism. However, the potential in the mangrove area has not been achieved optimally because the economic use of the results of the mangrove ecosystem has not been economically exploited. Therefore the economic level of the community in the coastal area of Langkat Regency is still relatively low and has not been able to develop other sectors based on coastal ecosystems. The development of technology and industrialization in the economy today are two things that are contradictory to the preservation of the natural environment around the world because the drive to improve the economy produces a lot of natural damage associated with unsustainable development. Consequently, the development of the economic sector becomes a strong challenge for the world economy by using a system that tends to be exploitative. The pattern of planning and management of the marine and fisheries sector must be reflected in the RPJMD and the strategic plan for Langkat Regency.*

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara kepulauan (*Archipalgic State*) terbesar di dunia yang terletak di Asia Tenggara dan juga terkenal di seluruh dunia karena memiliki pulau dengan pemandangan yang indah. Indonesia memiliki 17.499 pulau besar dan kecil dengan luas wilayah daratan dan perairan mencapai 8.300.000 km². Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km². Indonesia sebagai negara kepulauan dengan wilayah perairan yang luas memiliki sumber daya alam yang besar dan letak geografisnya yang strategis. Indonesia memang sudah seharusnya menjadi poros maritim dunia. Indonesia harus mampu memanfaatkan

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

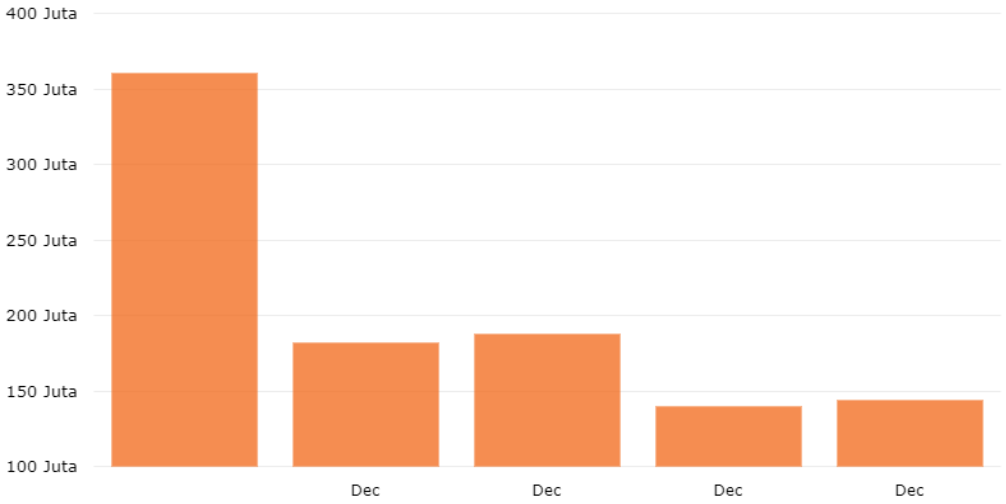
semua unsur kelautan di sekelilingnya untuk kesejahteraan rakyat dan kemajuan bangsa, juga harus mampu menghadirkan kekuatan keamanan laut yang memadai seperti *sea and coast guard* guna menjaga keamanan perairan Indonesia dari berbagai pelanggaran hukum.

Daerah pesisir merupakan wilayah yang penting apabila ditinjau dari berbagai sudut pandang perencanaan dan pengelolaan. Sejalan dengan pertambahan penduduk dan peningkatan kegiatan pembangunan sosial ekonomi, nilai daerah pesisir terus bertambah. Pada dasarnya daerah pesisir mempunyai potensi serta sumber daya yang melimpah, oleh karena itu seharusnya masyarakat pesisir lebih sejahtera dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Namun pada kenyataan masih banyak masyarakat yang tertinggal. Kehidupan masyarakat pesisir dan keluarga nelayan belum bisa dikatakan sejahtera bahkan mereka dilanda kemiskinan. Hal ini mengakibatkan generasi dari mereka yang tidak bisa mengenyam pendidikan lebih tinggi, sehingga anak–anak yang seharusnya belum memasuki usia angkatan kerja sudah harus melakukan pekerjaan yang membebani mereka untuk menambah nafkah dalam kerluarga. Adanya permasalahan seperti ini mengakibatkan kualitas sumber daya manusia tetap rendah dan juga kemiskinan yang berkelanjutan dikalangan nelayan atau masyarakat pesisir.

Seiring dengan waktu berbagai sektor yang terdapat dalam suatu negara sudah seharusnya maju dan berkembang. Peran pemerintah dalam mengoptimalkan dan meningkatkan kualitas kegiatan di setiap sektor sangat diperlukan sehingga kemajuannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor yang sejauh ini cukup berperan dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Pembukaan lapangan kerja, peningkatan produktifitas individu, peningkatan nafkah dan pendapatan hidup, penambahan devisa melalui kegiatan ekspor impor adalah beberapa peran sektor perikanan dalam pembangunan ekonomi. Perikanan juga menimbulkan *multiple effect* yang terbukti menggerakkan sektor lain, seperti: sector perdagangan, sektor industri bahkan sektor pendidikan yang terkait dengan berbagai riset-riset penelitian kampus dan serapan tenaga kerja terdidik. Perikanan selalu diarahkan ke proses industrialisasi berbasis IT yang akan semakin memacu dan menggerakkan sector-sektor lain agar terlibat dalam proses industrialisasi tersebut.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menunjuk wilayah pesisir di Kabupaten Langkat dengan kriteria lokasi rawan bencana dan perubahan iklim, mempunyai potensi ekonomi sumber daya kelautan, masyarakat pesisir masih miskin namun potensial aktif dan memiliki motivasi untuk memperbaiki kehidupannya, kondisi lingkungan permukiman kumuh. Kabupaten Langkat merupakan salah satu wilayah di Sumatera Utara yang memiliki kriteria tersebut. Oleh karena itu dalam penelitian ini dipilih Kabupaten Langkat sebagai wilayah yang akan diteliti kaitannya dengan *Blue Economy.* Pesisir Kabupaten Langkat merupakan salah sau daerah pesisir di Sumatera Utara yang terdapat 23 kecamatan dengan luas 6263.74 km. Dengan demikian bisa diketahui bahwa daerah pesisir Kabupaten Langkat berpontensial untuk lebih dikembangkan lagi. Namun hasil perikanan tangkap di Kabupaten Langkat masih cenderung sedikit jika dibandingkan dengan beberapa Kabupaten yang memiliki panjang dan luas pantai lebih kecil. Dalam hal ini sangat diperlukan berbagai kebijakan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041



Sumber: Realisasi Hasil Perikanan Kabupaten Langkat (www.sumut.bps.go.id)

Gambar 1. Produksi Perikanan Laut Kabupaten Langkat 2017-2021

Pada gambar 1 terlihat data dari produksi ikan laut di Kabupaten Langkat. Berdasarkan gambar 1 tersebut telah diketahui seberapa banyak dan seberapa besar potensi yang ada pada sumber daya kelautannya yaitu jumlah produksi perikanan laut Kabupaten Langkat. Produksi ikannya cenderung menurun pada setiap tahunnya. Produksi ikan laut paling banyak yaitu sebanyak 350 juta ton pada tahun 2018.

Tabel 1. Produksi Perikanan Tambak Kabupaten Langkat Tahun 2020

Jenis Tambak	Volume Produksi	Nilai Produksi
Tambak Intensif	4.829.240	420.303.840.000
Tambak Sederhana	675.540	40.532.400.000
Tambak Semi Intensif	323.880	41.391.640.000

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP (www.kkp.go.id)

Pada tabel 1 telah diketahui ada 3 jenis tambak di Kabupaten Langkat yang menghasilkan sumber daya perikanan. Produksi tambak yang paling banyak yaitu tambak intensif. Di wilayah pesisir Kabupaten Langkat terdapat masyarakat yang bermata pencaharian nelayan dan bekerja sebagai pembudidaya ikan. Produksi tambak dari masing-masing jenisnya cenderung fluktuatif. Agar ada nilai tambah pada ikan, hasil tambak biasanya diolah kembali untuk dijadikan makanan. Dengan demikian akan semakin mendukung dan mengembangkan industri rumah tangga yang ada di sekitar wilayah pesisir. Namun data tersebut menunjukkan bahwa jumlah produksi tambaknya berfluktuatif atau naik turun. Hal ini berarti dalam pengelolaan tambak harus ditingkatkan lagi agar bisa mempertahankan jumlah ataupun kualitas yang dihasilkan dari tambak tersebut.

Perikanan sebagai suatu kegiatan ekonomi seharusnya terus dimajukan dan dikembangkan serta menjadi prioritas sehingga mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang positif. Hal ini menuntut adanya inovasi dan kreativitas serta optimalisasi peran *stake holder*, dalam hal ini pemerintah, agar kegiatan perikanan tetap eksis dan bisa berkontribusi untuk kesejahteraan negara. Selain itu perikanan yang saat ini mengarah ke

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

proses industrialisasi harus mampu menjaga keberlanjutan usaha dengan tetap memperhatikan keseimbangan dan kelestarian perairan. Implementasi konsep pembangunan berkelanjutan atau *SDGs* (*Sustainable Development Goals*) di wilayah pesisir memberikan suatu arahan mengenai ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang bersinergi dimana merupakan poin penting dari 3 dimensi *sustainable development* dalam aspek pembangunan global ke depan untuk menangani kesenjangan masyarakat nasional sekaligus menjawab apakah masyarakat Indonesia mampu bersaing dikancah regional dan terlibat langsung dengan pasar bebas. Dalam pengembangan konsep SDGs yang belum optimal ini perlu adanya kontribusi yang melibatkan peranan dari *stakeholder* atau dari kalangan non-pemerintah seperti *civil society* organization, akademis, mahasiswa, sektor bisnis dan swasta serta kelompok lainnya.

Pembangunan yang berbasis wilayah maritim sebagai salah satu tujuan pemerintah menuju poros maritim dunia, maka pembangunan terhadap wilayah pesisir menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan maritim tersebut. Pemberdayaan seluruh mayarakat pesisir dalam sektor poros maritim dapat menjadi faktor pemerataan ekonomi di Indonesia. Lekat dengan budaya orientasi darat membuat masyarakat tidak mengetahui isu-isu maritim. Padahal pemberdayaan di sektor kemaritiman dapat menjadi instrumen bagi Indonesia untuk memiliki posisi yang lebih unggul dan berpengaruh terhadap pasar ekonomi regional maupun internasional. Berdasarkan hal ini muncul konsep *Blue Economy* yang digagas oleh menteri kelautan dan perikanan yang diharapkan dapat mendukung keberhasilan pembangunan yang berbasis pada eksplorasi dan bukan eksploitasi sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kerangka pembangunan *Blue Economy* juga mendukung inisiatif global dalam pencapaian agenda 2030 pada *Sustainable Development Goals* (SDGs), khususnya tujuan 14 : *(Life Below Water)* melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan serta mendukung tujuan 7 : *(Renewable Energy)* akses energi yang terjangkau, berkelanjutan dan modern untuk semua, tujuan 8 : *(Good Jobs and Economics Growth)* pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh serta pekerjaan yang layak untuk semua, tujuan 9 : *(Innovation and infrastructure)* infrastruktur dan industri inklusif yang berkelanjutan dan tujuan 17 : *(Partnership for the Goals)* kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan.

Luas ekosistem hutan mangrove yang tersebar di beberapa pulau yang ada di Indonesia sekitar 4.251.011 Ha. Dan lebih setengah luas ekosistem hutan mangrove tersebut dalam kondisi rusak parah. Hutan mangrove di Sumatera Utara terletak di sepanjang pantai timur, dari data BP2HM seluas 199.478 Ha. Hutan yang rusak seluas 59.077 hektare atau 33 %, dan seluas 47.868 Ha sudah direhabilitasi. Kabupaten Langkat memiliki luas mangrove yang paling dominan yakni 50.650,93 Ha, dan menempati urutan pertama lahan hutan mangrove paling rusak di Sumatera Utara, yakni seluas 13.526 Ha. atau sekitar 25 persen. Sedangkan, yang dalam kondisi sedang ada 23.564 hektar dan dalam proses rehabilitasi seluas 4.415 Ha, yang terluas rusak dan direhabilitasi di kabupaten Langkat di kecamatan Brandan Barat. Keadaan hutan mangrove di desa tersebut tergolong kondisi kerusakan berat 528 Ha dari luas kerusakan hutan mangrove 740 Ha, dari seluruh hutan mangrove 1200 Ha. Kerusakan tersebut akibat dialih fungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit dan tambak. Akibatnya, kondisi lahan menjadi rusak, mata pencaharian nelayan menurun drastis.

Perluasan tanaman sawit telah menghancurkan 75 persen atau 62.800 Ha kawasan pesisir dan kawasan tutupan hutan tersisa hanya 25 persen (Kompas, 30 Januari 2010).

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

Ekspansi kebun sawit menyebabkan perkampungan nelayan jadi rentan terhadap banjir, dan mereka makin sulit mencari ikan dan udang di wilayah tangkapnya sendiri. Konversi lahan besar- besaran itu telah menimbulkan berbagai macam persoalan. Secara ekologis, konversi telah menyebabkan menurunnya fungsi ekologis daerah tersebut. Masyarakat sekitar juga telah merasa termarjinalkan karena penguasaan dan akses terhadap wilayah semakin tertutup. Secara ekonomi mereka juga merasa dirugikan karena sumberdaya alam yang menjadi sumber pendapatan mereka, seperti nilai ekonomi mangrove, kepiting bakau, udang, ikan, dan lain-lain menjadi berkurang secara signifikan.

Penelitian ini akan menganalisis masalah perkembangan potensi ekonomi sumber daya kelautan wilayah pesisir dalam mencapai konsep *Blue Economy* Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara. Jadi banyak permasalahan yang harus ditangani oleh pemerintah baik secara nasional maupun daerah provinsi dan kabupaten, sehingga potensi alam seperti kawasan pesisir dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa ada melakukan perusakan alam sehingga pembangunan ekonomi dapat mengalami keberlanjutan dari waktu ke waktu.

TINJAUAN PUSTAKA

Karakteristik Masyarakat Pesisir

Konteks bagi masyarakat pesisir, bahwa karakteristik dari masyarakat pesisir pada umumnya desa relatif lebih terisolasi (masyarakat pulau kecil) dan masyarakat desa pantai dapat dijadikan gambaran wujud dari suatu komunitas kecil yang memiliki beberapa ciri, sebagai berikut : (1). Memiliki ciri khas kehidupan masyarakat nelayan, (2) Struktur berpikirnya dalam hidup lebih sederhana dari jumlah penduduk dengan jumlah yang cukup terbatas *(Smallness)* sehingga masih saling mengenal sebagai individu yang berkepribadian, (3) Kebudayaan hidup lebih seragam (*homogenity*) tapi dengan deferensiasi terbatas, dan (4) Dipengaruhi faktor lingkungan, musim dan dinamika pasar terbatas, sehingga semua dapat dipenuhi sendiri tanpa bergantung pada pasar diluar (Satria, 2002).

Indentifikasi Potensi Wilayah Pesisir

Indonesia merupakan negara kepulauan *(archipelgic state)* terbesar di dunia yang terletak di benua Asia, tepatnya wilayah Asia Tenggara dan terkenal karena ribuan pulau serta pemandangan alam laut dan wilayah dataran tinggi yang sangat indah. Luas Indonesia adalah 1.919.440 km² dengan luas daratan 1.826.440 km² dan luas 93.000 km² terbentang dari Sabang sampai Merauke, yang memiliki 17.499 pulau besar dan kecil dengan total luas wilayah (darat dan perairan) mencapai 8.300.000 km². Pada laman Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, bahwa total luas wilayah Indonesia tersebut 3,25 juta km² merupakan lautan dan 2,55 km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Hanya sekitar 2,01 juta km² wilayah Indonesia yang berupa daratan. Indonesia juga merupakan salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada yaitu 99.093 km².

Indonesia merupakan negara yang memiliki garis pantai (pesisir) yang sangat besar. Oleh karena itu sumberdaya kelautan di Indonesia melimpah, sehingga merupakan aset wilayah yang strategis untuk dikembangkan dengan basis pada pemanfaatan sumberdaya kelautan dan jasa-jasa lingkungan lainnya. Karakter kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sangat khas dengan berbagai potensi yang mungkin dimilikinya (Budiharsono, 2001), seperti: Potensi Wisata, Potensi Perikanan dan Kelautan, Potensi Industri, Potensi Perdagangan.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

Konsep *blue economy* pertama kali diungkapkan oleh Prof. Gunter Pauli dalam bukunya yang berjudul *The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs,* yang menggambarkan potensi manfaat teorinya bagi perlindungan lingkungan hidup komunitas dunia, pelestarian sumber daya alam, inisiatif pengurangan biaya industri dengan pengalihan pada konsumsi energi hijau, bersih, hasil daur ulang atau terbarukan. Dalam bukunya tersebut, Pauli (2006) menyebutkan bahwa *Blue Economy is a collection of innovations contributing towards the creation of a global consciousness rooted in the search for practical solutions based on sustainable natural systems*. *Blue Economy* mencontoh alam yaitu cara kerja ekosistem sesuai dengan apa yang disediakan alam dan cara bekerja dengan efisiensi tinggi.

Ada 100 inovasi ekonomi praktis yang mengilhami *Blue Economy* dengan prinsip mencontoh cara kerja ekosistem, ekosistem selalu bekerja menuju tingkat efisiensi lebih tinggi untuk mengalirkan nutrien dan energi tanpa limbah untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi semua kontributor dalam suatu sistem. *Blue Economy* memang tidak harus melulu tentang kelautan tetapi konsep ini cocok untuk sektor pembangunan pada sektor kelautan dan perikanan. Menurut Jusuf (2012), "ekonomi biru dapat dilihat sebagai kegiatan yang bertumpu pengembangan ekonomi rakyat secara komprehensif guna mencapai pembangunan nasional secara keseluruhan". Pendekatan pembangunan berbasis ekonomi biru akan bersinergi dengan pelaksanaan *triple track strategy,* yaitu program *pro-poor* (pengentasan kemiskinan), *pro-growth* (pertumbuhan), *projob* (penyerapan tenaga kerja) dan *pro-environtment* (melestarikan lingkungan). Ketika daya dukung (sumber daya) alam dan daya tampung lingkungan sudah tidak seimbang dan tidak kuat lagi dalam menampung dan memfasilitasi kegiatan penduduk (kualitas, kuantitas, dan mobilitas penduduk), maka otomatis kehidupan kita dan kehidupan generasi mendatang akan terancam karena kesalahan kita akibat kerusakan lingkungan. Agar tidak terjadi hal itu, memang dibutuhkan pemahaman, kesadaran, dan pembelajaran (pemberdayaan) kepada sesama akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan.

METODE

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga-lembaga resmi pemerintah serta dinas-dinas (SKPD) yang langsung terkait untuk menggunakan data yang telah dipublikasi seperti data BPS (Badan Pusat Statistik) Pusat, Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat. Selanjutnya ada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Langkat. Hasil analisis riset menggunakan tehnik analisis deskriptif dengan menyajikan data-data kuantitatif dalam bentuk tabel, info grafis dan analisis ekonomi yang menggunakan konsep pertumbuhan serta kontribusi sektoral untuk mengukur potensi ekonomi yang dihasilkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Langkat merupakan salah satu daerah yang berada di Sumatera Utara. Secara geografis Kabupaten Langkat berada pada 3°14'00"– 4°13'00" Lintang Utara, 97°52'00' – 98° 45'00" Bujur Timur dan 4 – 105 m dari permukaan laut. Kabupaten Langkat menempati area seluas ± 6.263,29 Km² (626.329 Ha) yang terdiri dari 23 Kecamatan dan 240 Desa serta 37 Kelurahan, sama seperti daerah-daerah lainnya yang berada di kawasan Sumatera Utara. Kabupaten Langkat termasuk kabupaten yang luas wilayahnya cukup besar, serta memiliki wilayah pesisir yakni di pantai timur Sumatera Utara hingga ke daratan tinggi

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

kawasan bukit barisan dan masuk juga kawasan Taman nasional Gunung Leuser (TNGL) yang kawasan hutan lindung ini banyak masuk di wilayah Provinsi Aceh. Musim kemarau dan musim hujan biasanya ditandai dengan sedikit banyaknya hari hujan dan volume curah hujan pada bulan terjadinya musim. Iklim di wilayah Kabupaten Langkat termasuk tropis dengan indikator iklim sebagai berikut : Musim Kemarau (Februari sampai dengan Agustus) dan Musim hujan (September sampai dengan Januari). Curah hujan rata-rata 2.205,43 mm/tahun dengan suhu rata-rata 28 derajat celcius -30 derajat celcius. Kabupaten Langkat untuk wilayah dataran tingginya juga ada dikenal masa musim angin puting beliung yang disebut dengan angin bahorok. Siklus angin ini akan membawa kerusakan tempat tinggal atau rumah-rumah masyarakat. Tetapi untuk 15 tahun terakhir siklus angin bahorok ini sudah lama tidak mengalami kejadian yang luar biasa lagi.

Potensi Wisata

Pemanfaatan sumber daya yang ada di pesisir tidak hanya melalui hasil perikanannya, namun juga bisa dimanfaatkan untuk bidang wisata alam lainnya. Karena dengan adanya wisata di wilayah pesisir, maka akan mendorong perkembangan wilayah dan juga pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Langkat. Berikut adalah beberapa wisata pesisir yang ada di Kabupaten Langkat:

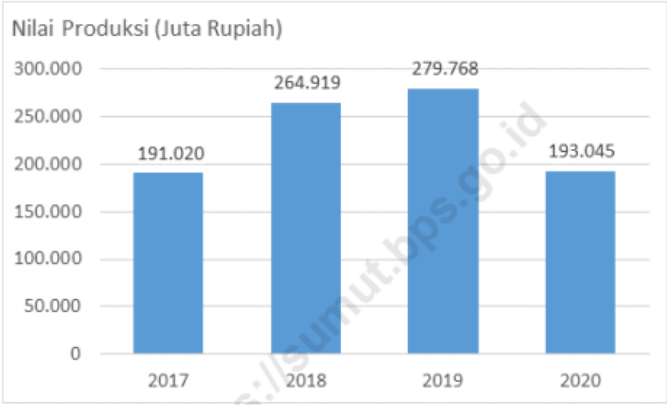
- *Getek online*, atau rakit bambu berukuran besar untuk wisata susur sungai dengan kapasitas maksimal delapan orang dalam sekali trip. Menikmati pemandangan indah dan tenang yang ditemani olah santapan udang dari hasil budidaya warga sekitar, juga menikmati kelapa segar yang dipetik dan diminum langsung di lokasi, membeli makanan-makanan ringan yang warga sekitar tawarkan. Di wisata yang beralamat di Desa Wisata Pematang Serai, Tanjung Pura ini semua makanan atau minuma itu dapat dipesan secara online.
- *Puncak Akui* berada di Desa Perteguhen, Pamah Semelir, Kecamatan Sei Bengei, degan konsep *Eco Tourism* yang menyediakan fasilitas *camping ground*. Kegiatan yang bisa dilakukan di sana ialah trekking hutan, fotografi alam, serta titik pandang matahari terbit.
- *Desa Jering Halus*, berlokasi di Kecamatan Secanggang yang menjadi sasaran utama untuk melepas hobi sebagain besar pemancing. Terdapat ribuan hektar hutan bakau dan pemandangan laut lepas yang sangat menakjubkan di sekeliling kawasan ini.
- *Pantai Kuala Serapuh*, berada di Kecamatan Tanjung Pura, juga bertempat di pesisir Perairan Selat Malaka, dengan pesona alam yang indah dan pantai pasing putih yang landai, lebih kurang seluas enam hektar. Tumbuh hutan Cemara hijau yang menjadi habitat berbagai jenis burung, kera dan monyet sebagai latar belakang pantai ini. Kegiatan volly pantai, memancing, camping, dan lomba layang-layang bisa dilakukan di sana. Ada fasilitas seperti *home stay* serta sajian makanan ringan khas melayu.
- *Pantai Barawe*, dengan hamparan pasir puting yang menghadap ke Selat Malaka cukup indah dan nyaman untuk kegiatan wisata bahari, yang berada di Pulau kampai Kecamatan Pangkalan Susu. Pantai ini dikenal sebagai pulau penghasil terasi atau belacan.

Potensi Perikanan

Hasil dari sumberdaya ini yaitu dari perikanan laut maupun ikan payau (tambak). Potensi ini merupakan salah satu potensi yang sangat mendukung pengembangan pada

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

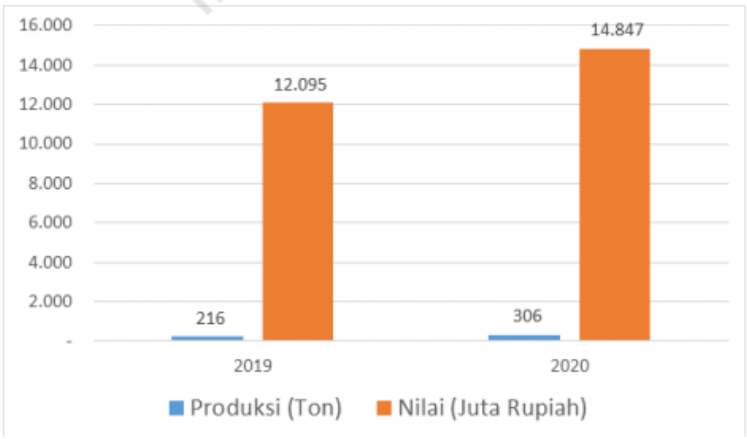
wilayah pesisir, sehingga harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik. Di Kabupaten Langkat sangat mempunyai potensi dalam dua hal tersebut. Berikut Gambar 2 adalah hasil dari perikanan laut maupun tambak:



Sumber: Statistik Perikanan (www.kkp.go.id)

Gambar 2. Nilai Produksi Perikanan Laut Kabupaten Langkat Tahun 2017-2020

Berdasarkan Gambar 2 dapat diketahui nilai produksi perikanan laut yang tertinggi terdapat pada tahun 2019 yaitu sebanyak 279.768 juta rupiah dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 193.045 juta rupiah. Kondisi ini dapat terlihat jelas adanya penurunan produksi dari perikanan laut sebagai akibat dari dinamika peruhbahan iklim sehingga situasi dari perubahan angin laut yang sangat kuat mengakibatkan produksi ikan tangkap mengalami penurunan tajam.



Sumber: Statistik Perikanan (www.kkp.go.id)

Gambar 3. Produksi dan Nilai Produksi Perikanan Tambak Kabupaten Langkat

Menurut Gambar 3 dapat diketahui bahwa jumlah produksi perikanan tambak pada tahun 2019 yaitu 216 ton dengan nilai produksi 12.095 juta dan pada tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 306 ton dengan nilai produksi 14.847 juta. Kabupaten Langkat cukup

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

potensial dalam menghasilkan perikanan laut, Tidak hanya potensi kelautan saja, Kabupaten Langkat juga mempunyai obyek wisata yang banyak menarik wisatawan lokal dan luar daerah. Penghasil tambak paling banyak karena sebagian besar masyarakat pesisirnya berkonsen pada usaha tambak. Berbagai jenis ikan tawar dibudidayakan dan hampir semua lahan yang ada di wilayah pesisir yang ada di Kecamatan Brandan Barat digunakan untuk tambak-tambak.

Potensi Hutan Mangrove

Kawasan hutan bakau di pantai timur Provinsi Suamtera Utara juga terus mengalami penyusutan, mirisnya dalam kurun waktu tiga dekade hutan bakau di pantai timur Sumatera Utara mengalami penyusutan hingga 60%. Hutan bakau di kawasan tersebut terus terdegradasi dan hialng karena beralih fungsi menjadi tambak ikan serta udang dan perkebunan kelapa sawit hingga semak belukarlantaran penebangan liar terhadap tumbuhan mangrove untuk dijadikan arang. Mulai dari Aceh Timur sampai ke Deli Serdang kawasan ini sudah kehilangan mangrove dalam kurun waktu 30 tahun terakhir sebesar 60%.

Penebangan liar dengan intensitas yang tinggi terjadi di sekitar Kabupaten Langkat, kawasan ini menjadi daerah di Sumatera Utara yang paling besar menyumbang hilangnya hutan bakau dalam kurun waktu 30 tahun terakhir. Kerusakan hutan bakau tidak sebanding degan program rehabilitasi yang selama ini dilakukan, kehilangan hutanbakau jauh lebih besar daripada program memulihkannya. Hal ini membuat tren Sumatera Utara baik di luar atau dalam kawasan konservasi luas hutan bakau terus berkurang, kerusakan hutan mangrove juga menyebabkan 66% jenis ikan jadi sulit tertangkap. Akibatnya dari sisi pendapatan nelayan berkurang lebih dari 40%, sejak 20 tahun terakhir penurunan luas tutupan hutan di pantai timur Sumatera Utara dapat diklasifikasi yaitu perkebunan kelapa sawit berperan sebanyak 45% dalam penurunan status kawasan hutan bakau, lalu tambak sebesar 35%, pertanian sebanyak 25% dan hal lain seperti abrasi, dapur arang, reklamasi tambang pasir itu 5% (WALHI, 2020).

Hutan mangrove terluas di Sumatera Utara terdapat di Kabupaten Langkat dengan luas 11.709,16 Ha pada tahun 2010 dan terjadi perubahan luasan hutan mengrove pada seluas 25.816,01 (Restu, 2012). Perubahan lauasan hutan mangroveterjadi di setiap kecamatan di Kabupaten Langkat dengan luas perubahan yang berbeda-beda. Keadaan mangrove yang mengalami kerusakan yang cukup parah berdampak pada kelompok nelayan yang kesulitan dalam berusaha mendapatkan pekerjaan dibandingkan sebelum kerusakan hutan mangrove (Purwoko, 2005). Pembangunan wilayah pesisir harus mengintegrasikan keberlanjutan fungsi ekologidan fungsi ekonomi. *Blue Economy* merupakan model ekonomi strategis yang dapatdi implementasikan pada kawasan wilayah pesisir, konsep *Blue Economy* berorientasi pada empat prinsip yaitu; (1) Kekuatan dan potensi wilayah tersebut, (2) Nilai tambah ekosistem mangrove dapat menunjang pembangunan wilayah pesisir, sehingga industri yang dikembangkan pada kawasan konservasi mangroveberbasis pada perikanan, perairan dan produk olahan mangrove, (3) pemberdayaan yang berorientasi pada penguatan ekonomi masyarakat secara mikro, (4) prinsip berkelanjutan, konsep pembangunan kawasan wilayah pesisir pantai timur khususnya Kabupaten Langkat harus mengintegrasi komponen ekonomi, ekologi dan sosial secara adil sehingga terjamin pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

Pengelolaan sumber daya kelautan di pesisir Kabuapten Langkat Kecamatan Brandan Barat menguji terkait faktor yang mempengaruhi keefektifan dan efisiensi konsep *Blue Economy* dalam mensinergikan kebijakan ekonomi sebagai implementasi SDGs untuk meraih target global Indonesia dan memajukan ekonomi masyarakat pesisir yang diharapkan terintegrasi dengan prinsip pengolahan serta tata kelola lembaga pengelolaan sumber daya yang baik sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan pemerataan kesejahteraan serta perbaikan sumber daya bagi masyarakat pesisir. *Blue Economy* di harapkan mampu menjadi referensi atas model pembangunan perikanan berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat yang menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya kelautan, namun menghasilkan produk dengan nilai yang lebih besar, kepedulian sosial dan tanpa limbah. Sehingga dengan hal ini Indonesia mampu menjadikan konsep *Blue Economy* menjadi landasan paradigma untuk meningkatkan kesadaran masyarakat pesisir tentang pentingnya menjaga sumber daya alam dan mampu mengolahnya sehingga dapat dijadikan aspek yang mendukung tingkatan ekonomiASEAN.

Potensi Industri

Hasil tangkapan ikan bisa diolah kembali menjadi bahan makanan atau makanan. Hal ini akan meningkatkan nilai tambah pada ikan dan juga akan tercipta inovasi-inovasi dan industri baru. Kabupaten Langkat memiliki beberapa industri pengolahan yang terkait dengan hasil perikanan. Berikut tabel 2 adalah beberapa industri rumah tangga pengolah ikan yang ada di Kabupaten Langkat:

Tabel 2. Jumlah Perusahaan Pengolahan/Pengawetan Menurut Jenis per Kecamatan di Kabupaten Langkat Tahun 2021

Kecamatan	Pengasinan		Perubahan (Unit)	
	Unit	Produksi (kg)	Unit	Produksi (kg)
Bahorok	2	0,28	-	-
Sirapit	-	-	-	-
Salapian	2	0,28	-	-
Kutambaru	-	-	-	-
Sei Bingai	5	0,53	-	-
Kuala	3	0,49	-	-
Selesai	5	0,64	-	-
Binjai	2	0,57	-	-
Stabat	5	1,13	-	-
Wampu	3	0,47	-	-
Batang Seranagan	3	0,58	-	-
Sawit Seberang	4	1,05	-	-
Padang Tualang	-	-	-	-
Hinai	5	2,34	2	0,33
Secanggang	20	36,33	20	8,50
Tanjung Pura	65	35,60	10	12,74
Gebang	50	35,45	10	8,03
Babalan	40	31,25	10	6,67
Sei Lapan	50	33,11	15	10,05

EKONOMIKAWAN : Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Volume 22, No.1 Juli 2022
P-ISSN: 1693-7600, E-ISSN : 2598-0157
Open Access: http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/ekawan
DOI : 10.30596/ekonomikawan.v%vi%i.11041

Brandan Barat	62	38,29	15	5,24
Besitang	-	6,38	-	-
Pangkalan Susu	25	18,48	10	2,65
Pematang Jaya	27	32,25	10	2,07
Langkat	378	275,50	102	56,65

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka 2022 (www.bps.go.id)

Menurut Tabel 2 terdapat 378 unit perusahaan pengasinan ikan dan 102 unit perusahaan pengolahan ikan. Unit pengasinan ikan terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Pura sebanyak 65 unit, sementara tempat pengolahan ikan terbanyak berada di Kecamatan Secanggang. Produksi pengasinan ikan terbanyak berada di Kecamatan Secanggang yaitu 36,33 Kg dan produksi pengolahan ikan terbanyak berada di Kecamatan Tanjung Pura yaitu 12,74 Kg.

SIMPULAN

Potensi yang ada di wilayah pesisir Kabupaten Langkat cukup banyak dan bermacam-macam. Mulai dari hasil kelautan dan perikanan yang melimpah, lalu potensi wisata yang berkaitan dengan pesisir. Terdapat banyak industri rumah tangga yang mengolah ikan laut maupun ikan tambak. Pangsa pasar dalam hasil olahan ikannya cukup bagus, karena diperdagangkan di wilayah lokal, luar daerah sampai ke luar negeri juga. Selain terdapat berbagai potensi, wilayah pesisir Kabupaten juga mempunyai masalah dalam beberapa hal. Diantaranya, masyarakat yang cenderung miskin, lingkungan yang kumuh, sumber daya manusia masih rendah, serta berbagai masalah dalam pemanfaatan sumber daya kelautannya. Dalam mengatasi hal-hal tersebut, pemerintah membuat beberapa program untuk wilayah pesisir Kabupaten Langkat. Program-program pengembangan wilayah pesisir selalu berkelanjutan setiap tahunnya. Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa wilayah pesisir Kabupaten Langkat memiliki banyak strategi yang dapat dilakukan dalam upaya menghadapi *Blue Economy.* Pentingnya pemberdayaan masyarakat dijalankan sebagai salah satu upaya menghadapi *Blue Economy,* karena pada kriteria ini merupakan langkah awal untuk menerapkan konsep *Blue Economy.* Diberdayakannya masyarakat adalah bekal untuk melaksanakan konsep baru tersebut. Dalam menerapkan *Blue Economy,* harus tercipta sumber daya manusia yang tergali potensinya agar siap dan bisa menjalankan kegiatan-kegiatan untuk menjalankan konsep itu secara maksimal. Empat strategi dalam kriteria pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. Pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir agar tercipta kelompok masyarakat yang mempunyai potensi serta bisa dipertanggungjawabkan.
2. Pelayanan usaha dan pemberdayaan masyarakat, supaya masyarakat pesisir bisa lebih mudah untuk melengkapi ataupun memulai usahanya serta lebih terarah.
3. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumber daya kelautan, hal ini bisa melatih masyarakat agar bisa memanfaatkan sumber daya kelautan secara baik, sehingga ada kesiapan untuk menghadapi *Blue Economy.*
4. Pendampingan program *grameen bank* pesisir, dengan adanya ini bisa memudahkan masyarakat pesisir untuk mendapatkan modal tanpa harus dibebani persyaratan-persyaratan seperti bank pada umumnya.

ACKNOWLEDGEMENT

Penelitian ini didukung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Lembaga Pengelola Dana Pendidikan melalui pendanaan Program Riset Keilmuan Tahun 2021.

DAFTAR PUSTAKA

Affandi, Anhar Rizki. (2012). Indonesia Bertekad Capai Blue Economy, VIVA News edisi 9 Juni 2012.

Hendra, Roy. (2010). Determinan Kemiskinan, Jakarta, UI Press.

Jusuf, Gellwynn (2012). Ekonomi Biru Menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan. Siaran Pers Tanggal 6 Juni 2012.

Mula. (2012). Ekonomi Biru Tidak Bertentangan dengan Ekonomi Hijau. Antara, 25 Juni 2012.

Pauli, Gunter. The Blue Economy, 10 Years, 100 Innovations, 100 Million Jobs□. Paradigm Publications.

Rani, F, dan Cahyasari, W. (2015). "Motivasi Indonesia Dalam Menerapkan Model Kebijakan Blue Economy Masa Pemerintahan Joko Widodo". Transnasional, 7 (1).

Sutardjo, Syarif C. (2012). Ekonomi Biru dan Industrialisasi Kelautan Perikanan, 15 September 2012.

Sutardjo, Sharif C. (2012). Ekonomi Biru Tidak Bertentangan dengan Ekonomi Hijau; Antara, edisi Senin, 25 Juni 2012.

Suhanto, (2011). UMKM: Pilar Fundamental Perekonomian Nasional, Direktur Dagang Kecil dan Menengah, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. http://www.menlh.go.id. Kementerian lingkungan Hidup, 6 juli 2012 http://id.berita.yahoo.com finance.html. Blue economy : perbaiki hubungan manusia dan laut.

http://www.analisadaily.com . Inisiatif "Ekonomi Biru" RI Vs Blue Economy Gunter Pauli, Harian Analisa, edisi Rabu, 22 Februari 2012.

http://3.bp.blogspot.com. Imam Hidayat, 2012. Indonesia: Ujung Tombak Green & Blue Economi Dunia.

http://www.rokhmindahuri.info. Aplikasi Blue Economy Dalam Pembangunan Kelautan Berkelanjutan. 10 Oktober 2012.

http://mindcommonline.com. Blue Economy harus diimplementasikan dalam percepatan industri kelautan dan perikanan. September 2013.